

## Transmigrasi Sebagai Mitigasi Bencana Alam (Study Kebijakan Trasmigrasi Penduduk Lereng Gunung Merapi)

**Leni Sriharmiati<sup>1</sup>, Mawar Sari<sup>2</sup>, Dita Islawati<sup>3</sup>, Miftackur Rohmah<sup>4</sup>, Afim Fiqrudin<sup>5</sup>, Tara Hijriyandani<sup>6</sup>, Fatkhatul Masruroh<sup>7</sup>, Aris Fianti<sup>8</sup>, Fadlurrahman, M.P.A<sup>9</sup>**

Universitas Tidar; Jln. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang, telp.(0293) 364113  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

### E-mail:

<sup>12345678</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116, telp (0293) 364113 /fax (0293) 362438  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang  
e-mail: [lenisriharmiati13@gmail.com](mailto:lenisriharmiati13@gmail.com)<sup>1</sup>, [sarimawar125@gmail.com](mailto:sarimawar125@gmail.com)<sup>2</sup>, [ditaIslawati4@gmail.com](mailto:ditaIslawati4@gmail.com)<sup>3</sup>, [Miftackurrohmah123456@gmail.com](mailto:Miftackurrohmah123456@gmail.com)<sup>4</sup>, [fiqrudinafim@gmail.com](mailto:fiqrudinafim@gmail.com)<sup>5</sup>, [Tarahijriyandani8@gmail.com](mailto:Tarahijriyandani8@gmail.com)<sup>6</sup>, [Fatkhatul03@gmail.com](mailto:Fatkhatul03@gmail.com)<sup>7</sup>, [arisfianti22@gmail.com](mailto:arisfianti22@gmail.com)<sup>8</sup>,

<sup>9</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar  
e-mail: [Fadlurrahman@untidar.ac.id](mailto:Fadlurrahman@untidar.ac.id)<sup>9</sup>

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mitigasi bencana alam: study kasus kebijakan transmigrasi penduduk lereng Gunung Merapi. Khususnya upaya mitigasi setelah bencana Gunung Merapi korban selamat untuk mengantisipasi kerugian lebih besar di kemudian hari. Dengan transmigrasi penduduk ke daerah yang lebih aman menjadi sebuah upaya penanggulangan bencana kemudian hari agar tidak memakan korban dan memperbaiki hidup korban selamat Gunung Merapi tahun 2010. Penelitian ini dilakukan dengan metode study pustaka dengan menganalisis data-data sekunder maupun tersier dari berbagai media, jurnal, artikel maupun buku terkait. Transmigrasi sebagai salah satu upaya mitigasi bencana dilakukan pada korban selamat dengan memindahkan penduduk ke luar Jawa, ke kawasan aman yang jauh dari titik bencana namun masih di lingkup Kabupaten Magelang.. Implementasi kebijakan transmigrasi dengan berbagai kesiapan oleh pemerintah pusat, meskipun menuai banyak pro dan kontra baik media, peneliti maupun masyarakat lereng Gunung Merapi.*

*Kata kunci : transmigrasi, mitigasi bencana, korban gunung merapi.*

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang dihimpun Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 November 2010, jumlah korban tewas sebanyak 275 orang dan sebanyak 39 orang korban tewas di Magelang (dari detiknews.com, 2010). Dari jumlah nilai kerusakan akibat letusan Merapi mencapai Rp 1,138 triliun atau 27 persen, sedangkan nilai kerugian adalah Rp 3,089 triliun atau 73 persen," kata Kepala Pusat

Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers di Jakarta, Senin 17 Januari 2011 (Muhammad.2010 dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id)). Kerugian yang cukup besar mulai dari kerugian materi dan mental yang menjadi penyebab masalah sosial baru. Melihat ini pemerintah terkait mengambil sebuah keputusan dengan memberlakukan kebijakan transmigrasi.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduk ke wilayah jarang penduduk. Transmigrasi dilakukan berdasarkan beberapa hal diantaranya pemerataan penduduk dan pembangunan, relokasi bencana, dan pencegahan masalah sosial seperti kemiskinan. Salah satu faktor transmigrasi alam kasus ini dengan melakukan transmigrasi sebagai upaya relokasi penduduk korban bencana gunung merapi. Dimana gunung merapi yang mengalami peletusan setiap dekade waktu delapan atau Sembilan tahun sekali mengalami fase istirahat. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar di masa mendatang dilakukan kebijakan untuk pengamanan penduduk dari bencana gunung merapi kedepannya dan memperbaiki keadaan hidupnya yang telah porak poranda karena bencana tersebut.

Mengatasi kerugian yang telah terjadi dan mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang maka dilakukan transmigrasi sebagai sebuah kebijakan yang tepat. Berdasarkan teori kependudukan fisiologi, sosial dan ekonomi oleh John Stuart Mill (Matra, 2007: 58). Dimana salah satu cara untuk mengelola kependudukan adalah dengan melakukan perpindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah lain yang dinilai masih jarang penduduk dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara merata, mengatasi kekurangan bahan makanan. Dari data BPS

dimana pulau Jawa menempati pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi dimana hampir 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan melakukan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan mengatasi ancaman bencana alam khususnya mitigasi bencana untuk korban letusan gunung merapi 2010 yaitu penduduk lereng gunung merapi.

Kebijakan transmigrasi sebagai mitigasi bencana gunung merapi memberikan kesempatan yang baik untuk mengatasi bahaya bencana dan masalah kemiskinan baru dengan kesempatan memulai hidup baru di daerah transmigrasi. Penelitian serupa yang menganalisis program transmigrasi penduduk lereng gunung merapi yang berfokus pada dampak oleh Alip Sontosudarmo (1996) yang berfokus pada perencanaan kebijakan transmigrasi daerah bahanya gunung merapi dimana saat itu penduduk masih enggan untuk berpindah (Sontosudarmo, 1996). Namun berbeda dengan keadaan setelah terjadi Gunung Merapi meletus yang akan dibahas lebih detail tidak hanya membahas hambatan di daerah asal dan tujuan.

Kebijakan transmigrasi dalam kajian ini lebih berfokus pada mitigasi bencana penduduk lereng gunung merapi sebagai korban selamat. Terutama perencanaan kebijakan sejak dini sangat penting untuk mencegah kerugian lebih besar dan menghindari

masalah yang sama di kemudian hari. Artikel ini akan membahas mengenai kebijakan transmigrasi sebagai mitigasi bencana khususnya kebijakan transmigrasi bagi penduduk lereng gunung merapi dan merumuskan masalah *“Bagaimana implementasi transmigrasi penduduk sebagai upaya mitigasi bencana Gunung Merapi korban selama bencana? (Study kasus transmigrasi penduduk lereng Gunung Merapi korban bencana gunung meletus tahun 2010).*

Akan dibahas mulai kebijakan pengelolaan penduduk dan ancaman manajemen penduduk yang kurang tepat, selanjutnya mengerucut pada pengelolaan penduduk korban bencana alam dengan transmigrasi sebagai upaya mitigasi bencana. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti pencegahan korban jiwa dan kerugian lebih besar lagi di kemudian hari, memperbaiki nasib kehidupan korban selamat dan percepatan serta pemerataan pembangunan.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini digunakan metode study kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data dari sumber yang relevan terkait dengan transmigrasi dan mitigasi bencana. Dari kajian literatur yang terkumpulnya dilakukan analisis data dengan analisis interaktif dimana analisis dilakukan

dalam bentuk siklus mulai dari pengumpulan data dari berbagai sumber web *online*, jurnal ilmiah dan berita dari berbagai media yang direduksi selanjutnya dilakukan penyajian data dan pengambilan keputusan. Saat kesimpulan dinilai masih kurang maka dilakukan pencarian data lebih lengkap dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan sehingga tercipta kesimpulan yang tepat dalam kajian transmigrasi sebagai mitigasi bencana bagi penduduk lereng Gunung Merapi khususnya Kabupaten Magelang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Transmigrasi

Kesadaran pengelolaan kependudukan tiap waktu mengalami peningkatan drastis menjadi topik utama dalam kebijakan pemerintah. Salah satunya kebijakan transmigrasi yang dilakukan dari zaman VOC dalam empat tahapan mulai tahun 1905-1911 berlanjut tahun 1912-1922, kemudian 1923-1932 dan yang terakhir antara tahun 1932-1942. Selanjutnya transmigrasi pada orde baru banyak dilakukan transmigrasi bedol desa, transmigrasi swakarya dan transmigrasi lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 hingga saat ini sudah terbentuk 23 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh menteri Pada tahun 2016 ini, pemerintah telah memberangkatkan 1.658 Kepala Keluarga pada per Desember 2016

(Kementerian pendidikan dan kebudayaan. 2016 dari <http://Kemendikbud.ri.co.id>).

Kebijakan transmigrasi berlatar belakang banyak hal diantaranya menciptakan keseimbangan penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan yang dimana titik pusat dari proses penyelenggaraan transmigrasi tentu adalah manusia. Paradigma pemerataan pendidikan juga merupakan salah satu alasan dari diadakannya transmigrasi, kesehatan dan jaminan sosial kepada golongan penduduk yang selama ini tidak terjamah oleh fasilitas –fasilitas sosial yang kita maksud diatas. Selain itu, transmigrasi juga berfungsi untuk mempercepat perubahan pengelompokan dan penggolongan manusia dan membentuk jalinan hubungan sosial dan interaksi sosial yang baru kata Martono di tahun 1986 (*Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat. 2017 dari <http://dalduksulbar.com>*).

Dan satu kebijakan terkait transmigrasi sebagai mitigasi bencana meletusnya gunung merapi pada tahun 2010. Bencana alam gunung meletus yang terjadi pada akhir tahun 2010 telah menimbulkan kerugian yang besar serta masalah kependudukan yang baru. Bencana alam dapat diartikan sebagai dan salah satu upaya untuk menanggulangnya dengan mitigasi bencana.

### 3.2. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan mitigasi bencana merupakan sebuah upaya untuk mengurangi risiko penyadaran, dan peningkatan kemampuan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 4 Tahun 2008 telah membagi mitigasi bencana terdiri atas mitigasi struktural serta mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan melalui upaya pembangunan fisik maupun sebuah pembangunan prasarana masyarakat dalam hal pengurangan resiko bencana. Mitigasi non-struktural dilakukan melalui upaya penyadaran maupun pendidikan dalam mengurangi risiko bencana (*Setiono,2014:dari <http://eprints.ums.ac.id>*). Mitigasi bencana melalui pembangunan fisik, seperti transmigrasi untuk mengamankan penduduk selamat dan menghindari kerugian bencana alam di kemudian hari.

### 3.3. Transmigrasi Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Gunung Merapi

Transmigrasi tidak hanya dipahami sebagai upaya pemerataan penduduk belaka namun, masih banyak hal terkait. Salah satu hal terkait transmigrasi adalah mitigasi bencana alam pasca bencana. Transmigrasi tersebut lebih berfokus pada korban selamat bencana. Dimana penduduk yang selamat diberikan penawaran program transmigrasi bagi mereka untuk memulai hidup baru yang

telah mengalami kerugian cukup besar dan susah memulai kembali dari awal. Dengan transmigrasi, korban selamat untuk mencegah korban dan kerugian lebih besar di kemudian hari serta pemulihan kehidupan sosial ekonomi sebagai upaya pencegahan munculnya masalah sosial baru seperti kemiskinan. Salah satu kebijakan transmigrasi sebagai upaya mitigasi bencana alam adalah transmigrasi penduduk lereng Gunung Merapi sebagai korban selamat dari meletusnya Gunung Merapi tahun 2010.

Setelah terjadi letusan Gunung Merapi yang cukup besar pada tahun 2010 yang berdampak kerugian besar. Adanya upaya penanggulangan bencana yang lebih dikenal dengan istilah mitigasi bencana. Mitigasi bencana dilakukan saat sebelum, saat kejadian dan saat sesudah bencana alam terjadi. Pemerintah menyadari perlunya kebijakan untuk mengatasi bencana gunung merapi (mitigasi). Mitigasi atau dipahami sebagai penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan, kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam rangka penanggulangan bencana maka dikeluarkan kebijakan yaitu program transmigrasi bagi korban bencana lereng Gunung Merapi.

Transmigrasi sebagai upaya mitigasi bencana melalui relokasi harus mempertimbangkan dua aspek yaitu kultural-

historis dan psikologi-kultural dimana keduanya menjadi unsur kuat pengikat warga dengan Merapi. Kultur-Historis berkaitan dengan pembentukan budaya masyarakat, tanah kelahiran sebagai sumber penghidupan, dan keyakinan. Aspek psikologi-Historis yaitu budaya yang mempengaruhi karakter masyarakat, kejiwaan dan karakteristik komunal. Dan hal tersebut menjadi sebuah hambatan bagi pelaksanaan transmigrasi penduduk lereng Gunung Merapi. Dari kepercayaan sebagai bentuk membudaya dalam berinteraksi menyakinkan masyarakatnya tetap tinggal (*Krisanto. 2010 dari <http://kompasiana.com>*).

Salah satunya kebijakan tersebut adalah transmigrasi untuk mengamankan korban selamat. Dalam kasus ini lebih berfokus pada mitigasi setelah bencana Gunung Merapi, dengan mengamankan korban selamat khususnya penduduk lereng gunung berapi untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Pemindahan penduduk (transmigrasi) dilakukan dengan memindahkan penduduk ke luar Jawa atau ke kecamatan di Magelang yang masuk kategori aman jauh dari kawasan bahaya Merapi.

“Dampak yang muncul dari letusan gunung api bagi masyarakat adalah terganggunya kehidupan masyarakat, seperti kehancuran rumah, kerusakan harta benda, bahkan sampai hilangnya korban jiwa. Untuk mengurangi dan memperkecil akibat bencana letusan gunung api diperlukan Mitigasi

Bencana Gunung Meletus. Mitigasi Bencana Gunung Meletus dapat dilakukan mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Berikut akan dibahas mengenai mitigasi sebelum terjadinya bencana gunung meletus (*Kamil. 2015 dari <http://kamillpasca.itb.ac.id>*)”

Pemerintah Kabupaten Magelang berencana menawarkan transmigrasi pada penduduk yang tinggal di zona bahaya Merapi. Beberapa penduduk dari tiga (3) kecamatan yang berada pada kawasan lereng Gunung Merapi mendapatkan prioritas transmigrasi. Di Magelang sebanyak 150 KK korban erupsi dan banjir lahar dingin telah mengajukan diri kepada pemerintah kabupaten agar diikutsertakan program transmigrasi. Pengungsi yang ingin ikut transmigrasi rata-rata rumahnya sudah hancur akibat hanyut terbawa banjir lahar. Mereka yakin transmigrasi bisa menjadi solusi memulai hidup baru (*Wicaksono.2011 diakses <http://nasional.tempo.co>*).

Sebenarnya program transmigrasi ini yang sudah direncanakan sejak lama mulai pada masa Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto.

“Penduduk lereng Gunung Merapi yang yang sewaktu-waktu terancam bahaya sebenarnya memperoleh prioritas untuk lebih dahulu ditransmigrasikan, seperti halnya para korban banjir di Lumajang. Hal ini dinyatakan Presiden Soeharto, Rabu siang, di atas jembatan baru sungai Krasak

(*ARS.2017 dari <http://soeharto.co>*). Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam memindahkan penduduk lereng gunung api sebagai korban selamat bencana meletusnya Gunung Merapi seperti pertimbangan daerah asal dan daerah tujuan.

Transmigrasi dilakukan dengan memindahkan korban selamat bencana Gunung Merapi pada tahun 2010. Pemerintah pusat menyediakan program dengan menawarkan program transmigrasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana seperti pengungsi letusan gunung berapi. Hal yang diutamakan dalam program harus menyediakan daerah tujuan yang sesuai dengan latar belakang daerah asal transmigran seperti beberapa kabupaten di Sumsel, Kalbar dan Sulbar. Program transmigrasi yang ditawarkan bersifat terbuka dan tidak memaksa.

Program transmigrasi yang dilengkapi dengan fasilitas modal awal seperti satu unit rumah dan lahan seluas 2 hektar. Transmigran sebagai mitigasi bencana ini dilakukan dengan memindahkan korban ke tempat aman atau bisa disebut program relokasi (*Gumilang. 2010 dari <http://m.jpnn.com>*). Persiapan transmigran dengan mengikuti program persiapan transmigrasi. Korban letusan gunung merapi diberangkatkan pada awal tahun 2011.

Pelaksanaan program transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk namun juga sebagai model pembangunan untuk

membangun komunitas baru dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial-budaya, dan pemerintahan di daerah transmigrasi. Upaya tersebut bertujuan untuk mengatasi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun daerah sentral pangan dan perkebunan untuk meningkatkan devisa negara (Purwoko. 2010 dari <http://m.republika.co.id>).

Program transmigrasi dinilai bukan solusi yang tepat dalam memecahkan persoalan pengungsi Merapi. Jangan gadaikan nasib pengungsi Merapi ke daerah lain yang belum tentu dapat menjamin masa depannya, sementara daerah tempat tinggal merak suatu hari menjadi ajang perebutan bisnis pengusaha dan elit politik (Alihar. 2014 dari <http://kependudukan.lipi.go.id>). Namun menilai kesiapan pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut untuk kesejahteraan hidup korban selamat yang dinilai sulit memulai hidup kembali, meskipun tidak semua korban selamat mau ikut program transmigrasi namun pemerintah tidak memaksa. Pemerintah pusat terutama kementerian sosial, tenaga kerja dan transmigrasi telah bekerjasama dengan Kemenhut yang menyetujui pelepasan kawasan hutan tersebut beralih fungsi menjadi lokasi perubahan untuk transmigran (Naldi. 2011 dari <http://m.viva.co.id>)

Transmigrasi sebagai mitigasi bencana ini juga sebagai bentuk pengamanan jumlah

penduduk produktif serta penyebaran penduduk. Terlebih saat ini Indonesia tengah menghadapi bonus demografi, sangatlah tepat digunakan transmigrasi untuk mengamankan penduduk produktif dari bahaya bencana dan penyebaran penduduk untuk pemerataan pembangunan nasional. Pemaksimalan bonus demografi juga harus diimbangi dengan pengelolaan yang tepat salah satunya melalui kebijakan transmigrasi.

#### 4. KESIMPULAN

Transmigrasi sebagai upaya mitigasi bencana dilakukan untuk tujuan sebagai berikut: mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran, mencegah kerugian lebih besar di masa mendatang, dan percepatan pembangunan nasional. Transmigrasi dilakukan dengan merelokasi penduduk ke luar Jawa atau kecamatan lain yang lebih aman dari kawasan bencana. Program transmigrasi bersifat terbuka dan tidak memaksa meskipun banyak masyarakat pro maupun kontra terhadap program transmigrasi.

Hubungan transmigrasi sebagai upaya mitigasi budaya terhadap bonus demografi yaitu dengan pemerataan penduduk pada tempat yang aman agar manusia produktif hidup aman dan berproduktivitas kinerja tinggi. Pada tempat yang aman dan nyaman kerja sehingga investasi pendapatan

meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.

<http://www.republika.co.id>, pada tanggal 23 Oktober 2017 9.33 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alihar, Fadjri. 2014. "Transmigrasi Korban Merapi" LIPI diakses dari <http://kependudukan.lipi.go.id>, pada tanggal 19 November 2017 pukul 13.59 WIB.
- [2] ARS. 2017. "Penduduk Lereng Gunung Merapi Juga Dapat Prioritas untuk Transmigrasi" diakses dari <http://soeharto.com>, tanggal 22 Oktober 2017 pukul 11.13 WIB.
- [3] fjr/nwk. 2010. "BNBP: Jumlah Korban Tewas Merapi 275 Orang" *detinews.com* diakses dari <https://news.detik.com>, pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 9.28 WIB.
- [4] Gumilang, Guslan. 2010. "Korban Bencana Ditawari Transmigrasi" JPPN.com diakses dari <http://m.jpnn.com/news/korban-bencana-ditawari-transmigrasi.com> pada 23 Oktober 2017 pukul 14.35 WIB
- [5] Isnainiati, Nur dkk. 2014. "Kajian Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman" diakses dari <http://ejournal3.undip.ac.id/jppmr> pada 23 Oktober 2017 8.22 WIB
- [6] Kamil pasca sarjana itb. 2015. "Mitigasi Bencana Gunung Meletus" diakses dari <http://kamilpasca.itb.ac.id>, pada tanggal 23 oktober 2017 pukul 8.27 WIB
- [7] Kementerian pendidikan dan kebudayaan. 2016. "transmigrasi mendukung Terwujudnya desa mandiri dan percepatan pertumbuhan wilayah" diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 10.30 WIB.
- [8] Krisanto, Yakup Adi. 2011. "Relokasi Korban Bencana: Legalistik vs Kultural-Historis (Kajian Penolakan Wraga Lereng Merapi terhadap Kebijakan Relokasi)" *Kompasiana*9 diakses dari <http://kompasiana.com>, pada 19 November 2017 pukul 14.52 WIB.
- [9] Mantra, Ida Bagoes. 2007. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.58
- [10] Muhammad, Djibril. 2011. "Kerugian Akibat Letusan Merapi Capai Rp 4,23 T". *republika.co.id* diakses dari <http://www.republika.co.id>, pada tanggal 23 Oktober 2017 9.33 WIB.
- [11] Moeis, Ery Sandra Amelia. 2015. "Program transmigrasi masa kolonial Belanda dari Kedu ke Gedong Tataan (1905-1941)" diakses dari <http://lib.ui.ac.id>, pada 23 Oktober 2017 pukul 10.39 WIB.
- [12] Naldi, Eri. 2011. "Korban Erupsi Merapi Transmigrasi ke Sumbar" *Viva* diakses dari <http://m.viva.co.id>, pada 19 November 2017 pukul 14.22 WIB.
- [13] Nugraha, Adhitya Putra. 2010. "Implementasi Kebijakan Transmigrasi Umum Di Kota Semarang" Vol.1 No.2 diakses dari <http://ejournal3.undip.ac.id/jppmr/1297> pada 17 Oktober 2017 pukul 15.01 WIB.
- [14] Nova, Yosi. 2016. "Dampak Transmigrasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Mayarakat Timpeh Dhamasyara" *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* Vol.5 No.1 diakses dari <http://ejournal.stkip.pgri.sumbar.ac.id>, pada 18 Oktober 13.15 WIB.
- [15] Pratama, Arliandy dkk. 2014. "Pemodelan Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Api Berbasis Data Penginderaan Jauh (Studi Kasus Di Gunung Api Merapi)" diakses dari <http://ejournal3.undip.ac.id>, pada 22 Oktober 2017 pukul 8.22 WIB.
- [16] Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat. 2017. "Sekilas tentang Transmigrasi dan Kebijakan Pemerintah sebagai Angin Segar Mencapai Kesejahteraan" diskses dari <http://dalduksulbar.com>, pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 11.34 WIB.
- [17] Pona, La. 2009. "Transmigrasi era Otonomi Khusus di Provinsi Papua" *jurnal Humaniora* volume 21 diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id>, pada 17 Oktober 2017 pukul 15.02 WIB.
- [18] Purwoko, Krisman. 2010. "Korban Merapi Diberangkatkan Transmigrasi ke Kalimantan" diakses dari <http://m.republika.co.id>, pada tanggal 19 November 2017 Pukul 13.45 WIB.
- [19] Saputra, Candra Dedy. 2016. "Migrasi (Bedol Desa) Masyarakat Wonogiri : Dampak Pembangunan Waduk Gajah Mungkur Tahun 1976-1990" diakses dari <http://eprints.uny.ac.id>, pada 18 Oktober 2017 13.18 WIB.
- [20] Setiono, Amin Nur. 2014. "Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Desa Dompok Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten"

Naskah Publikasi universitas Muhammadiyah  
Surakarta diakses dari <http://eprints.ums.ac.id>,  
pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 8.22 wib

- [21] Sontosudarmo, Alip . 1996. “*kajian tentang persepsi dan aspirasi penduduk korban bencana alam merapi terhadap program transmigrasi*” diakses <http://www.distrodoc.com>, dari pada 19 Oktober 2017 pukul 1027 WIB.
- [23] Syatri, Mahdor. 2005. “*Mobilitas Pekerjaan Transmigran Dari Pertanian Ke Non- Pertanian: Studi Kasus Di Daerah Transmigrasi Kabupaten Musi Banyu Asin Dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan*” diakses dari <http://etd.respository.ugm.ac.id>, pada 17 Oktober 2017 pukul 15.00 WIB.
- [24] Wicaksono, Pribadi. 2011. “*Warga Merapi Diprioritaskan Ikut Transmigrasi*” [Tempo.co](http://nasional.tempo.co) diakses dari <http://nasional.tempo.co>, pada 19 oktober 2017 pukul 14.15 WIB.
- [25] Yuminarti, Umi . 2017. “*Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Papua: Masalah Dan Harapan*” [Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 12 No. 1](http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id) diakses dari <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id> pada 13 Oktober 2017 pukul 13.13 WIB.